



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VIII DPR RI
KE KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 21-23 JANUARI 2022**



Sekretariat Komisi VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id

**JAKARTA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

JADWAL ACARA KUNJUNGAN SPESIFIK

DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Dasar Kunjungan Kerja
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Obyek Kunjungan Kerja

BAB II

KUNJUNGAN KERJA KE KABUPATEN PANDEGLANG

- A. Pertemuan di Kantor Bupati Pandeglang
- B. Peninjauan ke Lumbung Sosial Kemensos

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB IV

PENUTUP



**DAFTAR NAMA ANGGOTA
TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
KE KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 21-23 JANUARI 2022**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANG				
1.	289	Dr.H.TB ACE HASAN SYADZILY,M.Si	Ketua Tim	P G	JABAR II
2.	3	H. MARWAN DASOPANG	Wkl. Ketua	P K B	SUMUT II
3.	260	H. ARWAN M. ARAS T., S.Kom.	Anggota	PDIP	SULBAR
4.	231	IGN KESUMA KELAKAN, ST., M.Si.	Anggota	PDIP	BALI
5.	225	M. HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDIP	BANTEN I
6.	172	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.	Anggota	PDIP	JABAR VIII
7.	280	MOHAMMAD SALEH, SE.	Anggota	P G	BENG KULU
8.	92	Dr. H. JEFROY ROMDONNY, SE., S.Sos., M.Si., MM.	Anggota	G E R	JABAR IX
9.	62	M. HUSNI, S.E	Anggota	G E R	SUMUT I
10.	354	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr.	Anggota	NAS DEM	SUMBAR I
11.	371	Hj. SRI WULAN, SE., MM	Anggota	NAS DEM	JATENG III
12.	564	Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	Anggota	P D	N T B II
13.	529	Dr. H. ACHMAD, M.Si.	Anggota	PD	RIAU I
14.	438	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	Anggota	PKS	JABAR X
15.	-	AGUS WIDIJATMOKO, SH	SEKRETARIAT KOMISI VIII		

16.	-	RENO BULAN	SEKRETARIAT KOMISI VIII
17.	-	JODY PRATAMA PUTRA, M.Si	SEKRETARIAT KOMISI VIII
18.	-	RIZZA BIMA PERMATA , S.Pt	SEKRETARIAT KOMISI VIII
19.	-	SURATMAN, SH., MH	TENAGA AHLI KOMISI VIII
20.	-	MOHAMMAD HASYIM, M.Si	TENAGA AHLI KOMISI VIII
21.	-	ANDI NURUL NAUVAL RAMADHINA	PEMBERITAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapsiagaan bencana yang merupakan ruang lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Fungsi pengawasan ini dilakukan dengan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR RI memiliki hak di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
2. Pasal 98 Ayat (4) huruf f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Melakukan komunikasi dan menyerap aspirasi baik dari unsur Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Tujuan

- a. Secara umum untuk mendapatkan informasi dan data faktual mengenai kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Pandeglang.
- b. Secara khusus untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang dan Dinas Sosial Pandeglang dalam kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Pandeglang.

D. Lokasi Kunjungan Spesifik

Lokasi Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah ke Pendopo Kabupaten Pandeglang di Jalan Pendidikan No 3, Pandeglang, Provinsi Banten.

BAB II KUNJUNGAN KERJA KE KABUPATEN PANDEGLANG

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI berkumpul di depan Gedung Nusantara II Komplek DPR/MPR/DPD RI pada hari Jumat 21 Januari 2022 Pukul 07.00 WIB. Tim bergerak menggunakan Bus DPR RI pada Pukul 07.30 WIB dan tiba di Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Pukul 09.30 WIB.

Begitu tiba di Kantor Bupati Pandeglang, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI langsung disambut oleh Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, SE., MM. dan Plh. Sekda Kabupaten Pandeglang H. Taufik Hidayat, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang.

Selain itu hadir pula Pejabat dari Mitra-mitra Komisi VIII DPR RI, yakni Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, H. Pepen Nazarudin dan Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jhonny Sumbung.

A. Pertemuan di Kantor Bupati Pandeglang

Dalam pertemuan di Kantor Bupati Pandeglang, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI melakukan dialog dengan Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, SE., MM., dan jajarannya mengenai dampak gempa bumi yang mengguncang Pandeglang hari Sabtu tanggal 14 Januari 2022 lalu dengan catatan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyampaikan keprihatinan atas gempa bumi berkekuatan 6,6 skala richter yang mengguncang Pandeglang dan berharap masyarakat yang terdampak tetap tabah dan tawakal seraya berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan.
2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan jajarannya dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Gempa bumi di Pandeglang berdampak ke 30 kecamatan dari 35 kecamatan yang ada di Pandeglang, meliputi rusaknya 2.556 rumah, 73 fasilitas pendidikan, 20 fasilitas kesehatan, 11 kantor pemerintahan, 2 tempat usaha dan 43 sarana ibadah.
4. Tim dari BPBD Kab Pandeglang beserta FORKOMINDA, Dinsos dan OPD terkait, BPBD Provinsi Banten dan BNPB, jajaran TNI dan Polri telah melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk membantu para korban yang terdampak dan mendata kerusakan akibat gempa.

5. Bupati Pandeglang telah menerbitkan Status Tanggap Darurat dengan membuat Posko di lapangan.
6. Saat ini sudah tidak ada pengungsi sebab sebagian tinggal sementara di rumah kerabatnya dan aktivitas masyarakat secara berangsur-angsur mulai normal kembali.
7. Bantuan yang sudah disalurkan antara lain:
 - a. Dari Wapres Cadangan Beras Pemerintah seberat 2 ton dan 1.000 paket sembako serta 500 peralatan sekolah (senilai Rp288juta).
 - b. Dari Mensos berupa 500 paket sembako, 100 paket peralatan sekolah, genset dan box container (senilai Rp914juta).
 - c. Dari BNPB berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp500 juta.
 - d. Melalui Komisi VIII DPR RI berupa 600 paket makanan siap saji, air minum kemasan, 100 paket selimut, 25 unit tenda keluarga, 150 tenda gulung, 100 lembar kasur, satu unit tenda serbaguna keluarga, 100 matras, 100 paket popok bayi, 150 paket pembalut wanita, 30 paket kidsware dan 58 paket makanan anak.
 - e. Dari APBD Provinsi Banten berupa bantuan logistik.
 - f. Dari APBD Kabupaten Pandeglang berupa 316 bantuan paket sembako.
8. Gempa bumi di Pandeglang terjadi hanya selang 2 tahun setelah tsunami yang melanda Kawasan Tanjung Lesung pada Desember 2018 dan potensi tsunami masih menghantui kawasan ini di tengah isu *megathrust* yang patahannya berada di daerah Sumur, Pandeglang.

B. Peninjauan ke Lumbung Sosial Kemensos RI

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI juga mengunjungi Lumbung Sosial Kementerian Sosial RI yang didirikan di halaman Kantor Bupati Pandeglang.

Peninjauan ke Lumbung Sosial ini dilakukan untuk melihat kesiapan distribusi bantuan bagi para korban bencana termasuk juga penyiapan makanan bagi para korban yang terdampak.

Lumbung ini berisi antara lain:

1. Makan siap saji 120 paket
2. Pembalut wanita 200 paket
3. Tenda gulung merah 30 lembar
4. Matras 25 lembar
5. Selimut merah 30 lembar
6. Kasur 25 unit
7. Popok bayi 100 paket
8. Food ware 20 paket
9. Perlengkapan dapur keluarga 20 paket
10. Air mineral 10 dus
11. Velbed 3 buah

Selain juga ada logistik tambahan seperti:

1. Genset 1 unit
2. Tandon air 1.050 liter sebanyak 2 unit
3. Penjernih air 2 unit
4. Pompa air 1 unit
5. Instalasi pipa dan kran 1 paket
6. Pakaian dewasa 100 pcs
7. Pakaian anak 100 pcs
8. Sarden 65 gram sebanyak 8 dus
9. Biskuit sebanyak 4 dus
10. Obat-obatan 1 paket
11. Sarung sebanyak 50 lembar
12. Kompor high pressure 3 unit
13. Wajan jumbo 3 pcs
14. Dandang jumbo 3 pcs
15. Sutil besar nasi 3 pcs
16. Sutil kecil 3 pcs
17. Box container jumbo 3 pcs
18. Kernet 4 dus
19. Kabel rol 1 unit
20. Instalasi listrik 1 paket
21. Lampu penerangan 3 paket
22. Beras premium 400 kg
23. Tabung gas elpiji 12 kg sebanyak 3 unit

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pandeglang, Provinsi Banten, memberikan gambaran bahwa gempa yang mengguncang Pandeglang dan sekitarnya telah mengakibatkan banyak kerusakan fisik sehingga memerlukan bantuan dari semua pihak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mitigasi atas potensi bencana yang kemungkinan akan terjadi sebab ada peringatan dari BMKG bahwa kawasan Pandeglang berada di Patahan Selat Sunda yang memungkinkan terjadinya ancaman gempa bumi *megathrust* dan tsunami yang tinggi.

B. Rekomendasi

Dari hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pandeglang, Provinsi Banten ini dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya lumbung sosial di setiap kecamatan untuk mempermudah akses penyaluran bantuan apabila terjadi bencana di daerah yang jauh dari Ibukota Kabupaten Pandeglang.
2. Perlunya mitigasi bencana untuk memastikan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat merupakan yang utama apabila terjadi bencana baik gempa bumi *megathrust* ataupun tsunami.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka menjalankan Fungsi Pengawasan di Komisi VIII DPR RI.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si

FOTO-FOTO KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily dan rombongan diterima oleh Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, SE., MM. di Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten.



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily menerima cendera mata dari Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, SE., MM. di Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten.

FOTO-FOTO KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily menyampaikan penjelasannya pada saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten.



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily secara simbolis menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial RI kepada Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, SE., MM. di Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten.